

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kriminalitas pun semakin meningkat. Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, seseorang akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapainya sekalipun melanggar Undang-Undang.

Faktor ekonomi di Indonesia menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana suap, bahkan sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana suap dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan suap yang semakin kompleks.

Berdasarkan Tesis Sonata Lukman menyatakan bahwa :<sup>1</sup>

Pada hakekatnya perbuatan suap menyuap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral pancasila, yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa kenyataan sudah menunjukan bahwa suap sudah terjadi dalam berbagai bentuk dan sudah melekat pada sifat masyarakat.

---

1 Sonata Lukman, *“Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication”*, Tesis Sonata Lukman Universitas Indonesia. Jakarta, 2013. hlm.1.

Tindak pidana suap sendiri dapat berupa suap-menyuap kepada pemerintah ataupun swasta. Salah satu contoh mengenai tindak pidana suap kepada pemerintah yaitu seperti suap jabatan, sedangkan untuk suap kepada pihak swasta salah satu contohnya yaitu memanipulasi skor pertandingan(*Match Fixing*).

Tindak pidana suap tentang penetapan *Match Fixing* dalam pertandingan sepak bola sudah diatur didalam Undang –Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Kategori tindak pidana suap dalam penetapan *Match Fixing* pertandingan sepakbola tidak bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subjeknya ditunjukan kepada pemerintahan yaitu pegawai negeri sipil sedangkan perbuatan suap dalam penetapan *Match Fixing* dalam pertandingan sepak bola tidak tepat dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu delik suap yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur suap yang ditunjukan pelakunya kepada pegawai negeri sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap ditunjukan pelakunya kepada lembaga swasta.

Hal tersebut mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.

Tindak Pidana Suap selain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum diatur dalam KUHP yaitu terhadap penyuapan aktif dalam Pasal 209 dan 210 buku II Bab VIII KUHP, dan penyuapan pasif dalam Pasal 418, 419 dan 420 buku II Bab XXVIII KUHP, Secara khusus Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu diterima dan maksud daripada Pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak terjadi kasus suap *Match Fixing* di Indonesia. Sebenarnya Indonesia memiliki peraturan tersendiri dalam menangani kasus suap yang terjadi di sepak bola yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, akan tetapi dengan adanya konteks suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka aparat penegak hukum selalu menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap sepak

bola, yang dimana unsur suap untuk kasus *Match Fixing* dalam sepak bola sebenarnya tidak memenuhi unsur suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana suap dalam *Match Fixing* atau pengaturan pertandingan dalam sepak bola sendiri yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan. Tetapi biasanya *Match Fixing* sangat menitikberatkan pada hasil akhir sebuah pertandingan.

Melihat fenomena yang ada, Indonesia saat ini sebenarnya memiliki pengaturan mengenai tindak pidana suap, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

Ketentuan aturan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki produk hukum berkenaan dengan penyuapan yang bukan dilakukan oleh/kepada pejabat negara. Bahwa praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola memenuhi unsur-unsur pada ketentuan ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Adanya fenomena ini membelah dua pendapat mengenai relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dengan praktik pengaturan skor.

Eko Noer Kristiyanto, peneliti hukum olahraga di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, berpendapat bahwa :<sup>2</sup>

Otoritas negeri ini tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk menjerat para pelaku pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia dengan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, bahkan ia menekankan sudah terpenuhinya syarat dalam ketentuan pasal 2 dan 3, Namun bagi aparat berwenang saksi internal dari PSSI sudah cukup menghukum pelaku.

Direktur Keamanan *FIFA* Ralf Mutschke mengingatkan bahwa kompetisi sepakbola saat ini telah berubah karena mulai disusupi oleh pelaku kriminal secara terorganisasi, terutama dalam manipulasi pertandingan dan pengaturan skor. Ralf mengatakan para pelaku atau aktor pengatur skor tidak hanya menyuap perangkat pertandingan seperti pemain, wasit, pelatih dan sebagainya, bahkan mereka sudah mulai 'mengakuisisi' klub sepakbola. "Pengatur skor mulai ingin *take over* klub". Lebih lanjut, Ralf menegaskan bahwa *FIFA* menerapkan '*Zero Tolerance*' kepada pelaku pengaturan skor dan manipulasi pertandingan. Menurutnya, sekecil apapun manipulasi pertandingan bisa membunuh sepakbola dan menghancurkan permainan.

Ralf menegaskan *FIFA* tak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Karenanya, untuk memerangi korupsi di sepakbola, *FIFA* harus melibatkan anggota-anggotanya di seluruh dunia. *FIFA* juga telah menyiapkan alur penyelesaian kasus korupsi di sepakbola.

---

2 Eko Noer Kristiyanto, "Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakefektifan Penegak Hukum" [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/EKO.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EKO.pdf) , diunduh pada Sabtu 06 April 2019, pukul 07.32 Wib, hlm.1

Pertama, *FIFA* mengedepankan pencegahan. "Untuk memerangi korupsi, dimanapun, cara pencegahan adalah kunci sukses," Namun, bila cara ini belum berhasil, *FIFA* sudah menyiapkan tahap kedua yakni deteksi dan pengawasan.

Di tahap deteksi dan pengawasan, *FIFA* sudah menyiapkan sebuah *early warning system*. *FIFA* akan mengawasi pasar taruhan dan akan melihat bila ada trend yang mencurigakan. Bila ada pertandingan yang dicurigai, maka *FIFA* akan segera mengumpulkan informasi dari sejumlah pihak, seperti media massa atau penegak hukum. Sistem laporan ini bersifat rahasia. Lalu, bila kecurigaan semakin menguat, maka *FIFA* akan melakukan investigasi.

Terakhir adalah rekomendasi sanksi dari *FIFA Integrity Team* yang latar belakangnya meliputi :<sup>3</sup>

"Multidisiplin, seperti dari keamanan, wartawan dan orang hukum. Meski '*Match Fixing*' telah diatur dalam kode etik dan kode perilaku FIFA, Ralf berharap agar hukum di masing-masing di negara anggota FIFA bisa menindak kejahatan ini. "Walau, saya paham bahwa penegakan hukum di masing-masing negara cukup kompleks dan berbeda."

Terkait dengan *Match Fixing* di Indonesia, tentu masalah ini bukan masalah baru dalam dunia olahraga Indonesia, terutama sepakbolaan Indonesia, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktian dalam *Match Fixing* begitu sulit. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Harus dipahami bahwa selama tidak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu

---

3Ali, "FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa-sepakbola-telah-disusupikejahatan-terorganisir>, diunduh pada Sabtu 06 April 2019, pukul 08.39 Wib, hlm. 1.

pengaturan skor tidak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai *fairplay*, karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari atau memilih lawan dan sebagainya.

Langkah maju Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebenarnya bisa menjadi terobosan untuk menjerat semua tindak pidana suap di sektor swasta (*non-government*), namun karena kondisi politik rezim orde baru yang melindungi swasta kolega penguasa dan euforia reformasi yang menempatkan suap menjadi populer dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Sistem pencatatan peraturan yang buruk dan banyaknya peraturan (hampir setiap undang-undang) yang memiliki ketentuan pidana di Indonesia (dan tidak terkodifikasi) membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadi "aturan yang terlupakan. Hal itu diperparah oleh minimnya publikasi tentang aturan ini. Jangankan orang awam, penegak hukum sekalipun banyak yang tidak mengetahui peraturan ini. Contoh dilepasnya Johan Ibo adalah bukti nyata, karena pihak kepolisian melihat konteks suap mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang tentu saja tidak relevan dalam kasus ini.

Seiring dengan berjalannya waktu, telah terjadi banyak kasus perjudian dan suap *Match Fixing* di Indonesia, sebenarnya Indonesia memiliki peraturan terhadap tindak pidana suap, yaitu Undang-Undang No

11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yang menjadi undang undang terlupakan dikarenakan adanya konteks suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun salah satu kasus yang penulis akan uraikan mengenai

*Match Fixing* yang terjadi di Indonesia :

1. Kasus Johan Ibo seorang bandar judi pada tanggal 7 Mei 2015. Johan Ibo diduga sebagai seseorang pengatur skor pertandingan sepakbola, Johan Ibo ditahan karena berusaha menyuap pemain Pusamania Borneo FC (PBFC) agar bersedia mengalah saat menghadapi Persebaya Surabaya. Para Pemain Pusamania Borneo FC (PBFC) menolak dan melaporkan hal tersebut ke manajemen. Hingga akhirnya Johan Ibo pun dijebak oleh manajemen Pusamania Borneo FC (PBFC) di salahsatu restoran di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya.<sup>4</sup>

Hal ini tentu sangat miris, terlebih perjudian dan melakukan suap dilarang di Indonesia. Johan Ibo, Pelaku pengaturan skor yang tertangkap basah sedang berusaha menyuap para pemain Pusamania Borneo FC (PBFC), dilepaskannya Johan Ibo oleh pihak Kepolisian dikarenakan melihat konteks suap mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus ini. Dalam proses pemeriksaan, Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya AKP Dewa Putra Yoga mengatakan tidak ada bukti yang kuat untuk menjerat pria asal Papua tersebut. Di luar itu, belum ada pasal yang bisa disangkakan kepada Ibo. Dewa menerangkan, dua unsur yang bisa membuat seseorang didakwa melakukan penyuapan adalah

---

4 Cakrayuri Nuralam, "*Kronologi Penangkapan Terduga Perantara Bandar Judi Johan Ibo*", <https://www.liputan6.com/bola/read/2209571/kronologi-penangkapan-terduga-perantara-bandar-judi-johan-ibo>, diunduh pada Jumat 05 April 2019, pukul 17.46 Wib hlm. 1.



pejabat yang disuap dan mengganggu kepentingan publik. Namun, dua unsur tersebut tidak ditemukan dalam kasus Ibo.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, di mana di Belanda ada pejabat negara dan not pejabat negara, di Indonesia hanya ada pejabat negara, sedangkan non pejabat negara tidak diadopsi di dalamnya. Pada persepsi ini, suap di sektor swasta tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi berdasarkan UU Tipikor. Hal tersebut bukan berarti tidak memiliki dampak sama sekali dalam penegakan peraturan tersebut. Justru tidak diaturnya ketentuan suap di sektor swasta pada UU Tipikor memiliki keterkaitan dengan aktor yang dapat melakukan pemberantasan dan penegakan ketentuan tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, ada permasalahan yang timbul terkait tindak pidana suap dalam penetapan *Match Fixing* di dunia sepak bola yang dimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana suap dalam penetapan *Match Fixing* di dunia sepakbola, oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP TENTANG PENETAPAN MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN**

## UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP”

### B. Identifikasi Masalah

1. Faktor Apa yang menyebabkan diterapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Tidak Diterapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Suap tentang *Match Fixing* dalam dunia sepakbola?
2. Mengapa penyidikan kepolisian hanya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk kasus *Match Fixing* didalam pertandingan sepakbola?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia agar tidak bermasalah?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Faktor apa yang menyebabkan diterapkannya Tindak Pidana Korupsi Dan Tidak Diterapkannya Tindak Pidana Suap Dalam Tindak *Pidana Match Fixing*.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Tindak Pidana Suap Terhadap Penetapan *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang – Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

3. Untuk mencari solusi upaya dalam mencegah kasus *Match Fixing*

Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan

ilmu hukum dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam pembahasan Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan *Match Fixing*

Dalam Pertandingan Sepakbola.

- b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti

lainnya yang berminat mengenai masalah - masalah Tindak Pidana

Suap Tentang Penetapan *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) : Sebagai

bahan masukan dan sumbang pemikiran, yang diharapkan

bermanfaat bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesiadalam

pembahasan mengenai Tindak Pidana penetapan *Match Fixing*

didalam pertandingan sepakbola di Indonesia.

- b. Aparat Penegak Hukum(Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat) :

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran, yang diharapkan

agar Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus khususnya

Tindak Pidana *Match Fixing* dalam menggunakan unsur suap.

- c. Bagi Peneliti : Agar dapat mengetahui dan memahami secara mendalam tentang tindak pidana penetapan *Match Fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.
- d. Bagi Peneliti selanjutnya : Sebagai Refrensi pentingnya mengamati kejahatan terhadap Tindak Pidana Penetapan *Match Fixing* di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia mempunyai 4 (empat) Pilar Kebangsaan, 4 (empat) Pilar Kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (*soko guru*) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan.

Setiap negara terdapat sistem keyakinan (*belief system*) atau filosofi (*philosophische grondslag*) yang isinya berupa konsep, prinsip, serta nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Filosofi dan prinsip keyakinan yang dianut oleh suatu negara digunakan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4 (empat) pilar kebangsaan Indonesiayaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, UUD 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI), juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. NKRI adalah Negara kebangsaan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia adalah sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang

memiliki kebebasan dan juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui jika ternyata hukum itu memiliki dasar, sehingga tidak hanya menaati peraturan dan hukum yang ada namun kita juga menjadi tahu bagaimana asal muasal hukum yang ada itu dibentuk. NKRI memiliki dasar hukum yaitu pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berisi :<sup>5</sup>

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945, bahwa :<sup>6</sup>

"Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Konsep Negara hukum secara sederhana dapat diartikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan adanya hukum di dalam setiap praktiknya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada.

Dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabatnya maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dalam suatu wilayah tertentu

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Dan GBHN, Palito Media, 2014.hlm. 3.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 80.

yang memiliki tujuan tertentu dan Keragaman yang berbeda yang dikatakan dengan Bhineka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila, bersama-sama dengan Bendera Negara Merah Putih, Bahasa Negara Bahasa Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, merupakan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian lambang negara, beserta bendera negara, serta bahasa persatuan serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Dalam hubungan dengan lambang Negara Garuda Pancasila yang didalamnya terdapat seloka Bhinneka Tunggal Ika telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :<sup>7</sup>

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan

Bhineka Tunggal Ika”

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Memiliki 5 (Lima)

prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 99.

tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai

berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Dalam Permusyawaratan/  
Perwakilan;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sesuai apa yang diamanatkan dalam sila ke-3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia” yang mana berarti setiap warga negara Indonesia harus menjaga persatuan, kesatuan dan kedamaian antar sesama warga negara Indonesia lainnya. Begitupun didalam bidang olahraga salah satunya yaitu sepakbola harus memperhatikan kerjasama yang harmonis supaya terhindar dari perpecahan antar klub sepakbola. Dan berdasarkan sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mana mengandung arti setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi rasa keadilan dalam berkehidupan kebangsaan. Dalam pertandingan sepakbola harus mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan pengaturan yang ada. Oleh karena itu dalam pertandingan sepakbola tidak boleh berbuat curang dan harus bermain *fairplay*.

Tindak Pidana Suap merupakan salah satu kejahatan yang ada di Indonesia, tindak pidana suap sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengenai tindak pidana suap memang tidak secara jelas membahas mengenai hal tersebut, akan tetapi salah satu agenda reformasi di samping amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Sebelum adanya Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana suap diatur didalam KUHP. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*actieve omkoopng atau active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif (*passive omkoopng atau passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga



diangkat menjadi Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yaitu :<sup>8</sup>

"Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi: pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya."

Gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan pemberian hadiah kepada pejabat atau yang mempunyai kekuasaan dapat berupa uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan juga fasilitas lainnya.

Pasal 209 KUHP isinya :

"Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Dalam pasal 209 KUHP, barang siapa merupakan seseorang ataupun badan hukum memberikan atau menjanjikan sesuatu barang untuk kepentingannya kepada pejabat, yang dimana pejabat tersebut

---

<sup>8</sup> Antonius P.S.Wibowo [https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang\\_pidana\\_suap.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf), diunduh pada Kamis 25 Juli 2019, Pukul 11.35 Wib, hlm.6.

memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi maka diancam dengan pidana penjara.

Pasal 210 KUHP isinya :

"Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; dan barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Dalam pasal 210 KUHP, barang siapa merupakan seseorang ataupun badan hukum yang sedang dalam sengketa pengadilan memberikan atau menjanjikan sesuatu barang kepada hakim, yang dimana hakim tersebut mempunyai kewenangan dalam memutuskan suatu sengketa dan menguntungkan orang yang sedang bersengketa dan memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi maka diancam dengan pidana penjara

Pasal 420 KUHP isinya :

"Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; dan barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Dalam pasal 420 KUHP, seorang hakim yang sudah mengetahui bahwa barang yang diterima dapat mempengaruhi dalam putusan perkara yang sedang berjalan di pengadilan maka diancam dengan pidana penjara.

Pasal 418 KUHP isinya :

"Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Dalam pasal 418 KUHP, seorang pejabat yang sepatutnya mengetahui bahwa barang yang diterima dari seseorang ada hubungannya dengan jabatannya karena pejabat tersebut mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk bertindak melakukan sesuatu, maka diancam pidana penjara.

Tindak Pidana Suap selain diatur didalam KUHP juga diatur diluar KUHP. Tindak Pidana suap khususnya bagi sektor swasta diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Berikut ini merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana suap:

Pasal 2 UU No. 11/1980 isinya :

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama - lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)."

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yaitu seseorang yang memberi atau menjanjikan

kepada seseorang (non pemerintah) dengan maksud membujuk orang tersebut untuk melakukan yang menguntungkan dirinya dan orang yang disuap yang merugikan kepentingan banyak orang maka dipidana penjara karena memberikan suap.

Pasal 3 UU No. 11/1980 isinya :

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun."

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, seseorang (non pemerintah) menerima sesuatu atau janji yang seharusnya dia mengetahui janji yang dibuat ada maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan bertentangan dengan kewenangan serta kewajiban seseorang (non pemerintah) yang menerima sesuatu yang merugikan kepentingan umum, maka dapat dipidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Dalam hukum pidana kita mengenal asas-asas hukum pidana salah satunya yaitu asas legalitas.

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang menyatakan :<sup>9</sup>

---

9 P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 123.

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Mahrus Ali Memberikan pengertian tentang Asas legalitas dalam hukum pidana yaitu: <sup>10</sup>

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat terhadap tujuan hukum yaitu: <sup>11</sup>

"Salah satu ciri menonjol pada masyarakat yang menentukan bagaimana keadilan itu diselenggarakan, yaitu mempunyai lingkungan yang relatif stabil."

Dalam buku Rawls yang berjudul "*A Theory Of Justice*" atau yang

lebih dikenal dengan "Teori Keadilan" terdapat ide pokok penting yaitu :<sup>12</sup>

"Keadilan Sebagai *Fairness*, *Utilitarianisme Klasik*, Dua Prinsip Keadilan, Landasan Utama Dua Prinsip Keadilan, Kemanfaatan Sebagai Rasionalisme, Rasa Keadilan, Dan yang terakhir adalah Manfaat Keadilan". Menurut Francis Fukuyama, Keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena masih susahnya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*."

<sup>10</sup> Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.59.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 121.

<sup>12</sup> Francis Fukuyama, *TRUST : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta, 2007, Hlm.55

## F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis perlu menggunakan metode pendekatan yang bersifat alamiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto dikutip dari buku Anthon F Susanto:<sup>13</sup>

"Metode adalah prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis."

### 1) Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan Metode *deskriptif*

*Kualitatif* Metode *Deskriptif* menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>14</sup>

"pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menuliskan fakta-fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti."

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode *deskriptif Kualitatif*, dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis bagaimana Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo Undang - Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 2) Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :<sup>15</sup>

---

13 Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.159-160.

14 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 2010, hlm. 22.

15 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

"Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis."

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Tindak Pidana Suap yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang–undangan yang berlaku dan berkaitan pula dengan Penetapan *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia yang berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **3) Tahap Penelitian**

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

#### **(1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari:

- a) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;
  - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku - buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

(2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder kasus posisi, tabel dan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai Tindak Pidana Suap

Penetapan *Match Fixing* didalam pertandingan sepakbola.

**4) Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku - buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Suap tentang Penetapan *Match Fixing* didalam pertandingan sepakbola di Indonesia selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)



Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari kasus dan wawancara terarah atau terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

### **5) Alat Pengumpulan Data**

#### **a. Data Kepustakaan**

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

#### **b. Data Lapangan**

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi dan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan kasus posisi dan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **6) Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh peneliti dari skripsi yang dianalisis secara *yuridis normative* ini, yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak adanya tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat

baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan menggunakan penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan perbandingan hukum.

#### 7) Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

(1) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL.

Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL.

Dipatiukur No. 35 Bandung.

(2) Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

N o.	Kegiatan	2019					
		A pr il	M ei	Ju ni	J ul i	Agustus	Septem ber
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						

Kepolisian Negara Republik Indonesia JL. Trunojoyo No. 3

Jakarta Selatan

#### 8) Jadwal Penelitian